

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji mengenai relasi aktor dalam penetapan kawasan pusat pelayanan pendidikan Kabupaten Majene melibatkan aktor dengan berbagai kepentingan. Penetapan kebijakan terletak pada posisi sentral dari berbagai aktor politik itu sendiri, bahwasanya setiap proses penetapan kebijakan publik tidak dapat dipahami secara menyeluruh tanpa memahami proses yang terjadi, di mana aktor saling berinteraksi. Urgensi dalam penelitian ini terkait mengapa Majene ditetapkan sebagai pusat pelayanan pendidikan dan bagaimana interaksi antar aktor dalam membentuk jaringan memasukkan dan mengawal kepentingannya. Untuk memahami proses tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan new institusionalisme dan teori jaringan dari Wellman.

Studi-studi tentang kebijakan seringkali bersandar pada perspektif bahwa praktek kerja kebijakan berfokus pada ranah formal. Marsh & Stoker menjelaskan studi kebijakan diformulasikan bahwa seyogyanya formal memiliki kekuasaan dan kewenangan yang terlegitimasi karena melalui *procedural legal formal* yang sudah ditetapkan melalui perundang-undangan atau aturan pemerintah lainnya. Selain itu, kekuasaan administratif dinilai juga sebagai alat kekuasaan aktor formal dalam men-subordinasi pihak lain. Dari perspektif ini dapat menunjukkan bahwa arah kekuasaan tetap menjadi kuasa aktor formal (Yebi Ma'asan Mayruddin, dkk 2020:2).

Namun, jika melihat beberapa penelitian kebijakan yang dilakukan Helmke dan Levitsky menunjukkan bahwa lembaga formal merupakan seperangkat aturan yang diatur dalam struktur pemerintahan yang jelas. Sedangkan lembaga informal merupakan aturan-aturan sosial yang biasanya tidak tertulis, disusun dan dibicarakan di luar lingkup formal, namun dapat mempengaruhi keputusan politik (Fadli Afriadi 2021). Institusi informal dapat berperan dan mempengaruhi proses politik, hal ini terjadi karena aktor politik formal dan informal berinteraksi di luar ranah formal untuk mencapai tujuan yang pada dasarnya sama. Ketika lembaga formal tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, maka sebagian perannya digantikan oleh lembaga informal. Semakin besar kapasitas untuk melakukan substitusi peran, semakin besar kemungkinan lembaga informal untuk mengisi peran tersebut.

Studi kebijakan semakin penting dan menarik jika dikaitkan dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberi kesejahteraan kepada sebagian besar masyarakat, namun dibalik harapan tersebut juga diliputi kekhawatiran, otonomi daerah di cemaskan hanya akan melahirkan raja-raja kecil tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat (Maulana. 2022). Salah satu yang menjadi isu penting terkait dengan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah sebagai upaya membuka peluang-peluang baru untuk pemberdayaan masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai masalah muncul sehubungan dengan pemekaran

wilayah. Pemekaran wilayah tidak serta merta diikuti dengan terjadinya perubahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pemekaran wilayah justru menimbulkan konflik dan kepentingan antar daerah.

Pemekaran Sulawesi Barat dari Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari fenomena pemekaran wilayah di Indonesia. Meskipun pemekaran Sulawesi Barat terjadi beberapa tahun yang lalu, namun menarik untuk melihat proses pemekaran yang menjadi tupoksi pemerintahan saat ini. Gagasan paling menonjol adalah tentang dimensi kesenjangan wilayah. Pemekaran Sulawesi Barat dilakukan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat otonomi daerah di wilayah tersebut. Dengan adanya pemekaran, Sulawesi Barat diharapkan dapat mengelola sumber daya dan potensi daerahnya secara lebih efektif. Pemekaran ini memunculkan perselisihan antar daerah karena adanya persaingan kekuasaan dan sumber daya. Persaingan ini mencakup perebutan posisi politik, akses sumber daya dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Konflik bermula dari adanya persaingan antar daerah yang menginginkan ibukota provinsi.

Konflik terjadi ketika adanya permintaan dari Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Suhardi Duka kepada Komisi Pembentukan Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar) mengenai keinginannya menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Melalui Suhardi Duka, Kabupaten Mamuju mendeklarasikan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dengan syarat menjadi Ibu kota provinsi, jika tidak terealisasi Mamuju akan menarik dukungannya dari rencana pembentukan Sulawesi Barat. Sedangkan di lain sisi, syarat terbentuknya provinsi baru adalah minimal 5 kabupaten berafiliasi, kabupaten yang diharapkan bergabung yaitu, Kabupaten Polewali Mamasa yang akan di mekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju akan di mekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Mamuju dan kabupaten Mamuju Utara. Jika salah satu dari kabupaten Polmas, Majene dan Mamuju menarik diri, maka pembentukan provinsi Sulawesi Barat tidak dapat dilakukan.

Permintaan tersebut memicu perhatian dari berbagai pihak, masalah penempatan Ibukota Provinsi terlalu dini, melihat kondisi perjuangan pembentukan Sulawesi Barat belum mendapat legitimasi dari pusat. Wacana penempatan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat menjadi polemik berkepanjangan ketika pemerintah daerah Kabupaten Majene melalui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene M. Yunus Caco memberikan respon, penempatan ibukota provinsi harus kembali ke realitas sejarah. Pada masa kolonial Belanda, Kabupaten Majene merupakan pusat pemerintahan, ketika masih berbentuk *Afdeling Mandar*. Aksi kecaman juga datang dari Kabupaten Polewali Mamasa melalui Bupati Hasyim Maggabarani dan Masdar Pasmal sebagai Ketua DPRD kabupaten Polmas ikut yang menekankan bahwa daerahnya juga layak menjadi ibukota provinsi (Thamrin Mattulada 2017: 82). Melalui proses yang panjang, demi mempertahankan pemekaran Sulawesi Barat, Polmas dan Majene kemudian menyetujui Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi.

Pasca Kabupaten Majene gagal menjadi ibukota provinsi, HM. Jalaluddin Noer sebagai Bupati Kabupaten Majene bersama M. Yunus Caco (DPRD Kabupaten Majene), Muhammad darwis (Ka. Dinas Pendidikan Kab, Majene) dan Kalma Katta

(PUPR Kab. Majene) bekerja sama meminta posisi sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat. Argumentasi ini disampaikan kepada Komite Aksi Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (KAPP-Sulbar) sebagai motor penggerak pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah daerah Majene berupaya untuk tetap berperan penting dalam pembangunan daerah dengan meminta posisi sebagai pusat pelayanan pendidikan. Kabupaten Majene ingin memastikan bahwa peran dan kontribusinya tetap relevan bagi pembangunan provinsi, untuk menghindari kesenjangan antar daerah, melalui Rahmat Hasanuddin sebagai ketua KAPP-Sulbar menyetujui Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat.

Kabupaten Majene sebagai ikon pendidikan Sulawesi Barat melalui proses tarik ulur politik sebagai bentuk relasi yang terjadi antar aktor. Beragam konflik terjadi antar aktor politik lokal dalam mengawal kepentingan masing-masing. Meskipun di awal wacana pemekaran Sulawesi Barat, Majene menjadi kandidat terkuat dan mendapat legitimasi dari pejuang pemekaran, namun diujung perjuangan menuai kekecewaan dengan penetapan Mamuju sebagai ibukota provinsi dan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan.

Proses penetapan kebijakan tidak akan terlepas dari proses politik. Berbagai isu dan permasalahan kemudian saling diperebutkan menjadi alat oleh aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Aktor tersebut akan beradu argumen berusaha mengangkat masalah yang dianggap penting untuk mendapatkan legitimasi. Dengan kata lain dalam proses penetapan kebijakan, akan selalu ada dominan dan memiliki kemampuan dibandingkan dengan aktor lain. Disinilah peranan politik begitu kuat, dimana akan ada proses tawar-menawar atau *deal* tertentu antara para aktor. Berhasil atau tidaknya suatu isu yang diangkat bergantung pada kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*) dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh aktor tersebut.

Dalam konteks Kabupaten Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat, menarik untuk melihat mengapa Majene ditetapkan sebagai kota pendidikan, bagaimana interaksi aktor-aktor yang terlibat sehingga kebijakan ini lahir. Apakah terdapat *people power* yang menjadi salah satu aktor yang melebihi aktor-aktor lainnya. Lalu bagaimana aktor-aktor yang memiliki *power* yang besar saling berinteraksi. Adapun judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah **“Relasi Aktor Dalam Penetapan Kawasan Pusat Pelayanan Pendidikan di Sulawesi Barat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Majene ditetapkan menjadi pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat?
2. Bagaimana interaksi yang terjadi antar aktor dalam penetapan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis mengapa Majene ditetapkan sebagai sebagai pusat layanan pendidikan
- b. Menganalisis interaksi yang terjadi antar aktor dalam proses penetapan Majene sebagai pusat layanan pendidikan di Sulawesi Barat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu akademis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program magister (S2) pada Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang ilmu politik.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin memahami sentralisasi layanan pendidikan di Sulawesi Barat.
2. Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berminat mempelajari proses penetapan kebijakan layanan pendidikan di Sulawesi Barat.
3. Memberikan wawasan bagi penulis mengenai proses kebijakan sentralisasi layanan pendidikan setelah pemekaran Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Kajian Teori

1.4.1 Konsep Kebijakan

Sebelum mendalami lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu terlebih dahulu memahami konsep kebijakan itu sendiri, yang dalam Bahasa Inggris sering disebut sebagai "policy". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian prinsip dan ide yang menjadi dasar serta pedoman dalam merencanakan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (terkait dengan pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); juga mencakup pernyataan tujuan, cita-cita, prinsip, dan pedoman untuk manajemen dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Carl J. Frederick, seperti yang dikutip oleh Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, di mana terdapat hambatan serta peluang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Leo Agustino 2008:7). Pandangan ini juga menggarisbawahi bahwa gagasan kebijakan melibatkan perilaku dengan tujuan yang jelas, yang merupakan elemen penting dalam definisi kebijakan, karena pada

dasarnya kebijakan harus mencerminkan apa yang sebenarnya dilakukan, bukan hanya apa yang diusulkan melalui serangkaian kegiatan dalam menangani suatu masalah.

Richard Rose, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, menekankan bahwa kebijakan seharusnya dilihat sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait dan membawa dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, daripada sekadar sebagai keputusan tunggal (Sunarno, 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa menyamakan kebijakan dengan keputusan adalah kekeliruan, karena kebijakan sejatinya adalah sebuah arah atau pola tindakan, bukan hanya keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan berbagai pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau aktivitas, baik yang dilakukan maupun yang diabaikan, oleh individu, kelompok, atau pemerintah, yang melibatkan proses pengambilan keputusan dari berbagai pilihan yang ada, dengan tujuan mencapai hasil tertentu.

1.4.2 Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum, sehingga ruang lingkupnya sangat luas. Dari segi hirarki, kebijakan publik bisa bersifat nasional, regional, atau lokal, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, keputusan gubernur, hingga keputusan bupati atau wali kota. Secara terminologi, kebijakan publik memiliki banyak definisi, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk seluruh masyarakat." Sementara itu, Laswell dan Kaplan menggambarkannya sebagai "program terencana untuk pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang terarah" (Paul Cairney, 2020).

Menurut Pressman dan Widavsky, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah hipotesis yang mencakup kondisi awal serta dampak-dampak yang dapat diprediksi (Budi Winarno 2007). Kebijakan publik ini berbeda dari jenis kebijakan lainnya, seperti kebijakan swasta, yang dipengaruhi oleh keterlibatan pihak non-pemerintah. Robert Eyestone, dikutip oleh Leo Agustino, menggambarkan kebijakan publik sebagai "interaksi antara unit pemerintah dengan lingkungannya" (Leo Agustino 2008:6). Namun, banyak yang berpendapat bahwa definisi ini terlalu luas dan dapat mencakup banyak hal, sehingga sulit untuk dipahami secara spesifik.

Menurut Nugroho, kebijakan publik memiliki dua karakteristik utama: 1) Kebijakan publik mudah dimengerti karena dirancang untuk mencapai tujuan nasional, 2) Kebijakan publik dapat diukur karena keberhasilannya dalam mencapai tujuan tersebut sudah jelas (Riant Nugroho, 2011). Sementara itu, Wal, sebagaimana dikutip oleh Tankirisan, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang berpengaruh pada kehidupan publik. Thomas R Dye, dalam kutipan dari Islamy, mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan" (M Irfan Islamy 2014:19). Definisi ini

menekankan bahwa kebijakan publik lebih dari sekadar pernyataan niat; ini adalah implementasi tindakan konkret. Bahkan, keputusan pemerintah untuk tidak bertindak juga dianggap sebagai kebijakan publik, karena memiliki dampak yang setara dengan tindakan yang dilakukan.

Beberapa ahli menggambarkan kebijakan publik sebagai langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis dan isu-isu publik. Sejalan dengan pandangan Chandler dan Plano, yang dikutip oleh Tangkilisan, kebijakan publik dijelaskan sebagai pemanfaatan strategis sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat atau pemerintahan (Hessel 2003:1). Selain itu, kebijakan publik juga dipandang sebagai intervensi pemerintah yang berkelanjutan dalam mendukung kelompok masyarakat yang kurang beruntung, agar mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih layak dan turut serta dalam proses pembangunan.

David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai "pemberian nilai-nilai yang mengikat kepada masyarakat secara keseluruhan." Ini berarti bahwa hanya pihak-pihak dengan otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama masyarakat. Keputusan pemerintah, baik untuk bertindak maupun tidak, dianggap sebagai pemberian nilai-nilai tersebut. Pemerintah, sebagai otoritas dalam sistem politik, bertanggung jawab atas operasional harian sistem dan menangani berbagai permasalahan. Mereka yang memiliki tanggung jawab akan diminta membuat keputusan pada waktu tertentu, dan keputusan tersebut nantinya akan diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat untuk periode tertentu. Berdasarkan pandangan para ahli, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan, atau ketidakberhasilan bertindak, yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah publik, atau melayani kepentingan umum. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi (Jan Erik Lane, 2022)

1.4.3. New Institutionalism

Penelitian ini mengadopsi pendekatan institusionalisme baru atau kebijakan institusionalis baru. Menurut Miriam Budiarmo, pendekatan ini menjelaskan tentang organisasi, tanggung jawab peran yang ada di dalamnya, serta cara peran dan institusi berinteraksi. Berbeda dengan pendekatan institusionalisme lama yang memandang lembaga negara secara statis, institusionalisme baru melihat negara sebagai entitas yang dapat berkembang dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini berakar pada teori behavioris, yang menganggap politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari tindakan kelompok besar atau massa, dengan pemerintahan berfungsi sebagai lembaga yang mencerminkan aktivitas massa tersebut. Bentuk dan karakteristik lembaga ditentukan oleh aktor dan keputusan-keputusan yang mereka buat (Miriam Budiarmo 2008:96).

Institusionalisme baru beranggapan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi individu dalam suatu struktur, yang pada gilirannya mencerminkan institusi tersebut. Institusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan dan

keputusan pemerintah serta dapat mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat (Julia Barbar, 2025). Dalam pandangan institusionalisme baru, hasil dari suatu institusi tercermin dalam tindakan individu dan masyarakat. Jika proses pelembagaan menyebabkan konflik yang tidak dapat dikendalikan atau diprediksi, maka kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut dianggap gagal (Fadilah Putra 2019:13). Pendekatan ini memandang negara sebagai entitas yang memiliki kekuatan besar, meskipun fungsinya terbatas. Setiap kelembagaan memiliki dinamika yang terus berkembang, yang akhirnya memberikan dampak pada struktur organisasi. Hasil akhir diperoleh melalui kesepakatan dan negosiasi panjang atas perbedaan interpretasi serta faktor sosial yang ada.

Institusionalisme baru berlandaskan pada prinsip bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi individu dalam suatu struktur, yang pada gilirannya mencerminkan institusi tersebut (Julia Barbar, 2025). Institusi memiliki pengaruh besar terhadap keputusan dan tindakan negara, serta dapat mengarahkan perilaku para aktor yang terlibat. Dalam perspektif institusionalisme baru, dampak dari institusi terlihat pada perilaku individu dan masyarakat. Jika proses institusionalisasi mengarah pada konflik yang tidak terkendali dan tak terduga, maka kebijakan yang dihasilkan dianggap gagal (Fadilah Putra 2019:13). Hall dan Taylor mengelompokkan pendekatan institusionalisme baru menjadi tiga kategori, yakni institusionalisme historis, institusionalisme pilihan rasional, dan institusionalisme sosiologi (Hall & Taylor 1996:936). Konsep institusionalisme ini sejalan dengan perubahan politik yang terjadi di negara-negara demokratis. Pertama, adanya kelemahan dalam tatanan prosedural kelembagaan. Kedua, pengaruh pemimpin politik, baik formal maupun informal, yang mendominasi aturan yang ada. Proses interaksi antara aktor formal dan informal di luar ranah formal ini turut mempengaruhi jalannya proses politik.

Dalam institusionalisme baru, peran aktor, baik individu maupun kelompok, sangat penting dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Aktor aktif berperan dalam merancang institusi serta memengaruhi dinamika yang ada. Keputusan dan tindakan aktor dapat membentuk struktur, norma, serta aturan yang berlaku, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalamnya (Patrick Emmenegger, 2021). Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antar aktor dalam jaringan sosial, di mana aktor dapat membentuk aliansi, koalisi, atau kelompok kepentingan yang bekerja bersama untuk memengaruhi kebijakan. Interaksi dan hubungan kekuasaan antara aktor memiliki peran utama dalam menentukan keputusan dan dinamika institusional. Aktor dengan sumber daya lebih besar, akses ke jaringan yang lebih luas, atau posisi yang lebih tinggi dalam institusi, sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam analisis ini, sangat penting untuk memahami peran kekuasaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kekuasaan di antara aktor. Dalam institusionalisme baru, peran aktor dipahami dalam konteks interaksi sosial, dinamika kekuasaan, dan struktur institusional yang ada.

Pendekatan institusionalisme baru menganggap bahwa proses politik melibatkan lebih dari sekadar lembaga-lembaga formal, karena aktor-aktor individu

dan kelompok juga memegang peran penting dalam setiap tahapan proses politik. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran aktor formal, seperti eksekutif dan legislatif, serta peran aktor informal dalam pengambilan keputusan mengenai pusat pelayanan pendidikan dan budaya di Majene, yang masing-masing membawa kepentingan mereka sendiri.

1.4.4 Teori Jaringan Sosial Wellman

Teori jaringan didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antar aktor bersifat saling bergantung (*interdependensi*) (Johanna *et al*, 2023). Dalam pengertian yang lebih mendalam, hal ini berarti bahwa para aktor tidak dapat mencapai tujuan mereka tanpa menjalin hubungan dengan aktor lain, menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Asumsi kedua menyatakan adanya elemen heterogenitas. Setiap aktor memiliki cara dan akses yang berbeda dalam memperoleh sumber daya, serta kemampuan untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan menciptakan dampak (Muhammad Hamka 2022:84). Oleh karena itu, jelas bahwa aktor dalam suatu kebijakan tidak bersifat tunggal, melainkan plural.

Teori jaringan sosial yang dikembangkan oleh Barry Wellman memberikan kerangka analisis yang sangat relevan dalam memahami relasi sosial dan proses pengambilan kebijakan dalam masyarakat modern. Wellman memandang bahwa dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung, individu tidak lagi berada dalam ikatan komunitas yang tetap dan berbasis geografis. Sebaliknya, individu kini menjadi pusat dari jaringan yang longgar, fleksibel, dan tersebar. Konsep ini dikenal sebagai *networked individualism*, yakni suatu kondisi ketika individu membentuk dan mempertahankan hubungan sosial secara aktif dengan berbagai simpul jaringan yang berbeda, baik dalam konteks keluarga, pekerjaan, organisasi sosial, maupun komunitas virtual (Wellman, 2001). Dalam kerangka ini, kekuatan dan pengaruh individu tidak hanya ditentukan oleh posisi formal dalam struktur organisasi, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mereka menjalin dan mengelola jaringan sosial yang luas dan beragam.

Wellman menekankan bahwa perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah memunculkan pola hubungan sosial yang bersifat terdesentralisasi. Dalam masyarakat tradisional, hubungan sosial cenderung bersifat hierarkis dan berpusat pada komunitas lokal seperti keluarga besar, tetangga, dan institusi tradisional. Namun, dalam masyarakat jaringan, aktor-aktor sosial memiliki akses untuk membentuk koneksi lintas batas geografis, sektoral, dan institusional. Hal ini memungkinkan munculnya relasi sosial yang bersifat fleksibel, temporer, dan berbasis pada kebutuhan serta kepentingan yang spesifik. Individu menjadi aktor yang otonom dalam membangun jejaring sosial mereka, memilih dengan siapa mereka ingin berinteraksi, serta menentukan intensitas dan bentuk hubungan tersebut (Wellman, 1999).

Struktur jaringan sosial menurut Wellman tidak bersifat acak, melainkan terbentuk melalui pola hubungan sosial yang memiliki sifat transisi dan simetri. Artinya, apabila seseorang terhubung dengan dua individu atau lebih dalam satu jaringan, maka kemungkinan besar individu-individu tersebut juga saling terhubung.

Selain itu, terdapat distribusi relasi yang tidak merata dalam jaringan, di mana sebagian aktor memiliki posisi yang lebih strategis sebagai pusat atau penghubung dibandingkan aktor lainnya yang berada di posisi pinggiran. Struktur ini menunjukkan bahwa kekuasaan, informasi, dan sumber daya tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada aktor-aktor tertentu yang memiliki keterhubungan tinggi dan peran kunci dalam jaringan (Wellman & Berkowitz, 1988). Dengan demikian, aktor-aktor yang mampu menjangkau lebih banyak simpul dalam jaringan atau menjadi penghubung antara simpul-simpul yang berbeda memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya.

Wellman juga menekankan bahwa relasi antaraktor dalam jaringan bersifat interdependen, di mana tidak ada satu pun aktor yang benar-benar otonom. Untuk mencapai tujuannya, setiap aktor membutuhkan hubungan dengan aktor lain dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pihak lain tersebut. Hal ini menciptakan dinamika negosiasi, kerja sama, pertukaran informasi, dan bahkan konflik di dalam jaringan. Dalam proses ini, aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk menjangkau banyak jaringan sekaligus dan memainkan peran sebagai penghubung antaraktor atau antar kelompok jaringan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Oleh karena itu, pembentukan aliansi atau koalisi menjadi strategi penting bagi aktor-aktor yang ingin mempertahankan atau memperluas pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan (Wellman, 1999). Selain itu, dalam jaringan sosial, informasi dan dukungan mengalir tidak hanya secara vertikal dari atas ke bawah, melainkan juga secara horizontal dan bahkan diagonal. Pola ini menciptakan peluang dan tantangan baru dalam proses komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi kepentingan antaraktor.

Dalam konteks kebijakan publik, teori jaringan sosial Wellman mengajukan bahwa kebijakan tidak lagi dapat dipahami sebagai hasil dari keputusan sepihak aktor negara atau pemerintah, melainkan sebagai hasil interaksi yang kompleks dan berlapis-lapis antara berbagai aktor dalam jaringan. Kebijakan merupakan produk dari proses negosiasi antar aktor yang memiliki sumber daya dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana suatu kebijakan terbentuk, perlu dianalisis bagaimana jaringan sosial antara aktor-aktor tersebut berfungsi, siapa yang memegang posisi strategis, dan bagaimana proses komunikasi serta pertukaran informasi berlangsung di dalam jaringan tersebut (Wellman, 1983). Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak lagi berada secara eksklusif di tangan pemerintah atau lembaga formal, melainkan tersebar dalam jaringan yang terdiri atas berbagai aktor, termasuk masyarakat sipil, kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah, dan individu-individu yang memiliki akses terhadap sumber daya tertentu.

Teori jaringan aktor menurut Wellman bertujuan untuk memodelkan dan menganalisis interaksi strategis antara agen-agen yang terhubung dalam suatu jaringan. Dinamika interaksi ini bertujuan untuk memahami bagaimana keputusan yang diambil oleh individu dalam jaringan dapat mempengaruhi hasil keseluruhan dan mencari solusi yang dapat mengoptimalkan keuntungan bersama atau

menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Teori ini berlandaskan pada seperangkat prinsip yang secara logis saling terkait, yang meliputi:

1. Hubungan antar aktor umumnya bersifat simetris dalam hal lingkup dan kekuatan. Aktor-aktor berinteraksi dengan menyampaikan berbagai konten yang dapat meningkatkan atau mengurangi intensitas hubungan.
2. Interaksi antar individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas, karena hubungan antar individu tidak terlepas dari keseluruhan jaringan.
3. Struktur hubungan sosial membentuk jenis jaringan yang tidak bersifat acak. Jaringan ini bersifat transitif: jika A, B, dan C terhubung, maka kemungkinan juga ada hubungan langsung antara A dan C. Namun, ada batasan jumlah dan kekuatan hubungan yang bisa terbentuk, yang mengarah pada pembentukan kelompok jaringan dengan batasan tertentu dan sifat eksklusif.
4. Kelompok jaringan akan memunculkan interaksi, baik antar kelompok jaringan itu sendiri maupun antara individu-individu yang terlibat.
5. Koneksi asimetris antar elemen dalam jaringan mengarah pada distribusi sumber daya yang terbatas dan tidak merata.
6. Secara umum, distribusi sumber daya yang terbatas dan tidak merata disebabkan oleh adanya kolaborasi antara beberapa pihak. Namun, kelompok lain akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Oleh karena itu, teori jaringan menggambarkan sifat dinamis dengan adanya perubahan pada struktur sistem yang merespons perubahan dalam pola koalisi dan konflik.

Prinsip-prinsip di atas menunjukkan bahwa jaringan terbentuk sebagai hasil dari kecenderungan manusia untuk berpikir rasional. Ketika individu dihadapkan pada situasi tertentu yang mengharuskan mereka menggunakan faktor eksternal, muncullah dasar kerja sama yang menjadi fondasi bagi perkembangan konsep jaringan. Penerapan teori aktor jaringan Wellman memberikan wawasan penting mengenai bagaimana keputusan dan tindakan agen-agen individu dapat memengaruhi efisiensi dan hasil keseluruhan dalam suatu jaringan yang kompleks. Aktor adalah entitas individu dalam jaringan yang memiliki tujuan dan kemampuan untuk membuat keputusan. Aktor-aktor ini dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Jaringan sendiri merujuk pada koneksi atau hubungan antara agen-agen dalam jaringan tersebut. Koneksi ini bisa berbentuk saluran komunikasi, pertukaran informasi, atau interaksi langsung antar agen. Setiap agen memiliki tindakan yang dapat dipilih dalam konteks interaksi dengan agen lainnya. Selain itu, setiap agen memiliki preferensi atau nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi keinginan mereka terhadap hasil tertentu, seperti keuntungan ekonomi, kepuasan pribadi, atau faktor lainnya. Dalam jaringan, agen-agen terlibat dalam interaksi yang melibatkan pengambilan keputusan strategis, di mana satu agen dapat memengaruhi hasil yang diinginkan oleh agen lainnya. Interaksi tersebut mencakup koordinasi, kompetisi, negosiasi, atau kolaborasi antara agen-agen yang terlibat.

Dalam penelitian ini, pendekatan Wellman digunakan untuk mengkaji proses penetapan Kabupaten Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan di Sulawesi

Barat. Melalui teori jaringan sosial ini, analisis diarahkan pada pemahaman bagaimana aktor-aktor lokal, baik yang memiliki posisi formal seperti pejabat pemerintah daerah dan legislatif, maupun yang bersifat informal seperti tokoh masyarakat atau pejuang pemekaran, berinteraksi dalam jaringan sosial-politik untuk mengusulkan, memperjuangkan, dan akhirnya menyepakati kebijakan tersebut. Penekanan diberikan pada bagaimana hubungan sosial yang telah terbangun sebelumnya, kekuatan jejaring yang dimiliki oleh aktor, serta strategi yang digunakan dalam membangun koalisi dan mencari dukungan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, teori Wellman menjadi sangat berguna untuk memetakan peta kekuasaan yang tersembunyi, mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang berperan sebagai penggerak jaringan, serta menelusuri bagaimana pengaruh mereka menyebar melalui hubungan interpersonal, simbolik, dan struktural. Oleh karena itu, teori jaringan sosial Barry Wellman memberikan kontribusi penting dalam menganalisis dinamika relasi aktor dan bagaimana jaringan sosial menjadi arena distribusi kekuasaan dan pembentukan kebijakan.

1.4.5 Interaksi Aktor dalam Kebijakan

Lindblom menyatakan bahwa untuk memahami proses pembuatan kebijakan, penulis harus menjelaskan peran yang mereka mainkan dalam proses pembuatan kebijakan, baik yang formal maupun informal. Menurut pandangan Anderson, Lindblom, dan banyak ahli lainnya, perdebatan mengenai siapa yang seharusnya terlibat dalam pengambilan keputusan politik melibatkan beberapa aspek berikut: Pelaku Formal mencakup 1) Birokrasi, 2) Eksekutif, 3) Legislatif, dan 4) Lembaga peradilan; sedangkan Pelaku Informal meliputi 1) Kelompok kepentingan, 2) Partai politik, dan 3) Individu warga negara (Budi Winarno 2014:126).

Aktor politik memainkan peran penting dalam alokasi dan distribusi kebijakan, di mana interaksi antar mereka cenderung bersifat konfrontatif daripada berorientasi pada konsensus. Interaksi sosial sering kali mencakup unsur kerja sama serta konflik atau persaingan. Proses ini merupakan dinamika sosial yang terjadi di antara aktor-aktor politik. Menurut Gilin dan Gilin, sebagaimana dikutip oleh Soekanto, proses sosial yang muncul dari interaksi sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Muhlis Madani 2011:49). Aktor politik sangat berpengaruh dalam pengalokasian dan pendistribusian kebijakan melalui interaksi yang lebih condong pada konflik dibandingkan konsensus. Interaksi sosial sering melibatkan kerja sama (*cooperation*) serta konflik atau persaingan (*competition*). Proses sosial ini terjadi di antara aktor dalam kebijakan. Gilin dan Gilin, dalam pandangan Soekanto, menyusun klasifikasi proses sosial yang timbul dari interaksi sosial sebagaimana dijelaskan berikut (Muhlis Madani 2011:49).

Proses koalisi adalah bentuk interaksi yang terwujud dalam kerja sama atau kesepakatan, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Kerja Sama (Cooperation):** Merupakan proses interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama atau mencapai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Thompson dan McEwen, ada lima bentuk kerja sama, yaitu kerukunan, tawar-menawar (*bargaining*), kooptasi (*cooptation*),

koalisi (coalition), dan usaha bersama (joint venture) (Soerjono Soekanto 2001:66).

2. **Akomodasi (Accommodation):** Merujuk pada usaha untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan antara organisasi tanpa menyebabkan kekalahan atau kerugian yang signifikan, serta dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Bentuk-bentuk akomodasi meliputi coercion, kompromi, arbitrase, mediasi, toleransi, kebuntuan, dan adjudikasi (Soerjono Soekanto 2001:51).
3. **Asimilasi (Assimilation):** Adalah proses sosial yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok, dengan fokus pada menciptakan kesatuan dalam sikap, tindakan, dan aktivitas mental berdasarkan tujuan dan kepentingan bersama (Soerjono Soekanto 2001:88).

1.5 Telaah Pustaka

Bagian ini, peneliti menyajikan beberapa studi sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian. Kesamaan dan perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut sangat membantu peneliti dalam membangun argumen-argumen dalam penulisan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Pembahasan
Puput Ratna sari, (2020)	"Politik Pembangunan di Kota Palangka Raya menuju <i>Smart City</i> Kota Palangka Raya."	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan peran politik dalam proses pembangunan Kota Palangka Raya menuju konsep <i>Smart City</i> . Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat berbagai lapisan stratifikasi yang terlibat, dengan empat aktor utama yang berperan, yaitu pemerintah Kota Palangka Raya, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu-individu, yang semuanya berinteraksi langsung dalam pembangunan.

Penulis	Judul	Pembahasan
Fadli Afriadi, dkk (2021)	"Interaksi Aktor Institusi formal dan informal (studi kasus: Tim 11 dalam pemerintahan Kutai Kartanegara."	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asal-usul dan aktivitas kelompok Tim 11 dalam struktur pemerintahan formal di Provinsi Kutai Kartanegara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kemunculan Tim 11 berkaitan dengan dinamika hubungan patron klien. Hubungan ini mengalami berkaitan dengan dinamika hubungan patron-klien. Hubungan ini mengalami perubahan setelah Rita Widyasari menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010. Tim 11, yang sebelumnya berada dalam posisi sebagai klien, kini bertransformasi menjadi patron dengan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Rita Widyasari sebagai bupati terpilih.
Ahmad Nur Fauzi (2018)	"Analisis Peran aktor dalam formulasi kebijakan Semarang <i>Smart City</i> ."	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan Semarang Smart City. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak nasional melibatkan 24 pejabat pemerintah, mulai dari Walikota Semarang

		hingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam hal komponen swasta, Pemkot Semarang bekerja sama dengan empat pemangku kepentingan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan Kebijakan Semarang Smart City. Para pelaku utama yang terlibat adalah PT Dian Nuswantoro, Teknologi dan Informasi (Dinustek), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Daerah (PLN), serta Ibu Retno Susanti sebagai akademisi. Namun, Pemkot Semarang belum melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini. Ketika pemerintah berinteraksi dengan sektor swasta dan masyarakat, muncul perilaku kooperatif di mana pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta dalam hubungan yang saling menguntungkan. Kerja sama ini juga mempererat keterkaitan antara aktor politik dengan tindakan yang mereka ambil. Selain berkolaborasi dengan sektor swasta, pemerintah juga menyediakan aplikasi bagi masyarakat.
--	--	--

Sumber: Dirangkum dari beberapa sumber

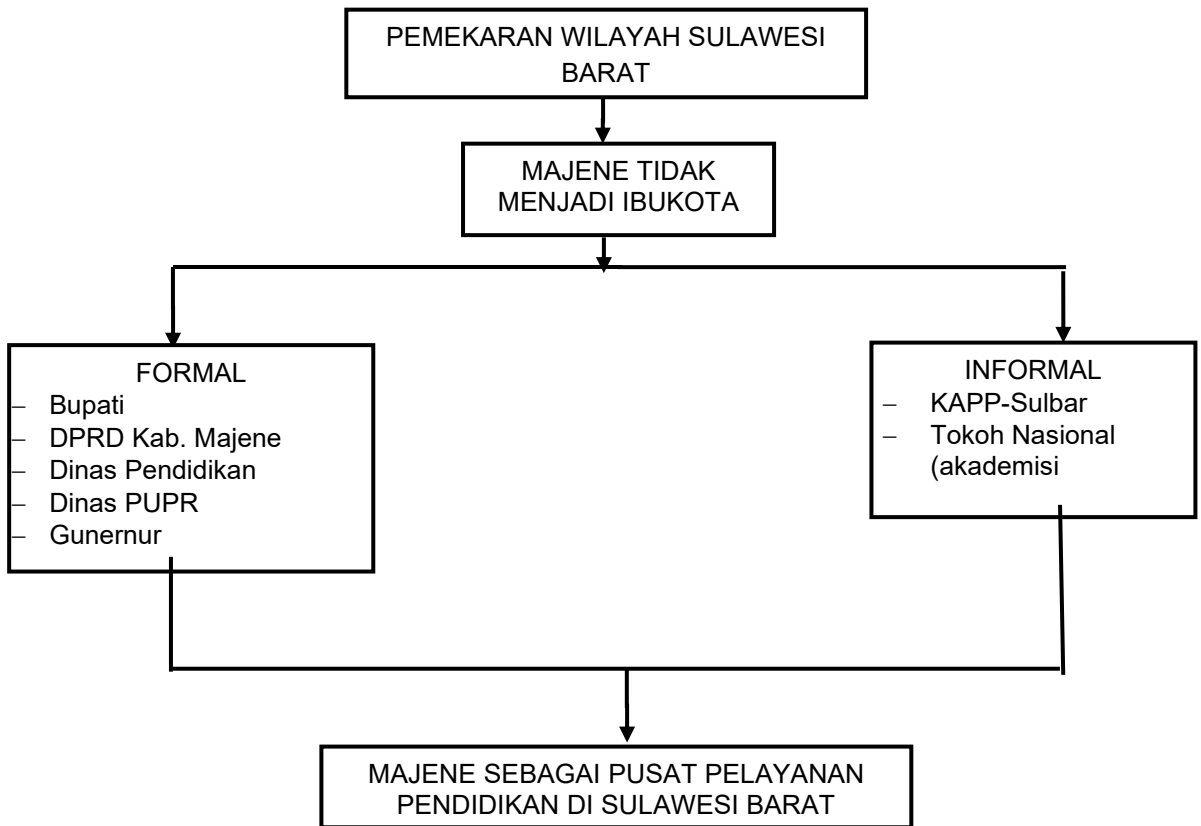
Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan beberapa studi sebelumnya yang digunakan sebagai acuan. Persamaannya terletak pada pembahasan peran dan interaksi aktor dalam proses pengambilan kebijakan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menekankan pada interaksi antar aktor dalam pengambilan keputusan terkait pusat layanan pendidikan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam proses pemekaran Provinsi Sulawesi Barat, berbagai aktor dengan latar belakang formal dan informal terlibat dalam perjuangan menentukan pusat kekuasaan dan pelayanan. Ketika Kabupaten Majene gagal menjadi ibu kota, para aktornya tidak menyerah, tetapi melakukan reposisi kepentingan melalui institusi formal (Pemkab Majene, DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR) dan jejaring informal (KAPP-Sulbar, KAPP-Pokja, Tokoh Nasional Mandar [Prof Basri Hasanuddin & Prof. Baharuddin Lopa]). Interaksi ini berlangsung dalam konteks jaringan sosial yang kompleks, sebagaimana dijelaskan oleh Wellman, di mana kekuatan aktor tidak hanya ditentukan oleh posisi struktural, tetapi oleh kapasitas mereka membangun jaringan, menjalin koalisi, dan mengelola sumber daya sosial dan politik. New Institutionalism memberikan landasan untuk melihat bagaimana interaksi tersebut terjadi dalam kerangka kelembagaan yang dinamis, sementara teori jaringan sosial membantu memetakan kekuatan hubungan antar aktor. Maka, penetapan Majene sebagai pusat pelayanan pendidikan adalah hasil dari relasi strategis, negosiasi, dan kompromi yang terjadi di dalam jaringan institusional dan sosial-politik yang saling berkelindan.

1.7 Skema Berfikir

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran di atas, maka skema berfikir dalam penelitian ini dipetakan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Berfikir

Sumber: Pemikiran Penulis

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan intensi menganalisis suatu kasus tertentu secara mendalam dan rinci (Atherton dan Klemmack, 2011). Pemilihan metode ini berdasar pada pengumpulan data, lalu divalidasi dengan data lapangan yang dikumpulkan dengan metode analisis kualitatif. Kajian ini didasarkan pada konsep-konsep yang sebelumnya banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan dan teori jaringan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus. Penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan institusionalis baru dan teori jaringan Wellman untuk menjelaskan fenomena relasi aktor dalam penetapan pusat pelayanan pendidikan pada pemekara Sulawesi Barat.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa pertimbangan bahwa Pemekaran Sulawesi Barat sebagai otonomi baru akan menimbulkan proses politik yang kuat terkait perebutan posisi-posisi sentral atau pemetaan pembagian wilayah administrasi. Kemudian keberadaan Kota pendidikan akan memberi keuntungan tersendiri kesempatan pertumbuhan ekonomi terbuka, peluang-peluang sosial dan mempercepat proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Majene.

2.3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Elizabeth *et al*, 2023) Data primer adalah sumber asli yang diperoleh dari informan melalui proses wawancara. Data primer merupakan pendapat dari individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Sumber data utama penelitian ini adalah para pejuang pemekaran Provinsi Sulawesi Barat yang terlibat langsung dalam jaringan penetapan pusat pelayanan pendidikan di Majene. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung atau pengumpulan data melalui dokumen dan sebagainya (Sugiyono 2016:137). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, majalah, dokumen, surat kabar, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, peneliti biasanya menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh data. Peneliti memilih dan menggunakan metode yang tepat tergantung pada arah penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data (Carlo Caduff, 2023). Penjelajahan internet dan survei lapangan dilakukan untuk

mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Studi lapangan dilakukan dengan teknik sebagai berikut untuk memperoleh data primer:

2.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data menggunakan mengajukan pertanyaan secara eksklusif sang pewawancara (pengumpul data) pada Informan (Irawan Soehatono 2011:68). Wawancara dilakukan pada aktor yang terlibat dalam penetapan pusat pelayanan pendidikan di Majene baik formal maupun informal. Keterbatasan dalam pengumpulan data primer dialami peneliti akibat tidak tersedianya informan kunci lainnya, mengingat sejumlah aktor yang terlibat langsung dalam penetapan Majene sebagai pusat pendidikan Sulbar telah meninggal, sehingga akses terhadap informasi otentik menjadi terbatas. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Kalma Katta	Mantan Bupati Majene
2	Syahrir Hamdani	Mantan Anggota Legislatif Polman/Mantan Ketua Pokja Polmas
3	Armia	Ketua Komisi 3 Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Majene
4	Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST., MT.	Resktor STAIN Majene

2.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data menggunakan cara mengalir atau merogoh data-data berdasarkan catatan, dokumentasi, administrasi yg sinkron menggunakan kasus yg diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau file-file berdasarkan komunitas yg diteliti, yaitu mencari data tentang hal-hal atau variable yg berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah & sebagainya (Sugiyono 2016:138).

2.5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan secara sistematis terhadap data-data wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain supaya peneliti bisa menyajikan apa yg sebagai temuannya (Andrea J Bingham, 2023). Untuk mengungkapkan rekanan aktor pada penetapan sentra pelayanan pendidikan pada Kabupaten Majene menggunakan memverifikasi kiprah & hubungan aktor memakai teori jaringan aktor, maka teknik analisis pada penelitian ini memakai contoh Miles & Haberman (Muhammad Idrus 2009:148).

2.5.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang menitikberatkan pada pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Muhammad Idrus 2009:150-151). Dalam reduksi data, peneliti mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan. Atur data sehingga peneliti dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir.

2.5.2. Display Data (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah reduksi adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lain-lain. Dalam hal ini, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Menampilkan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan hasilnya (Sugiyono 2009:245).

2.5.3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dasar dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja yang perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat melakukan verifikasi hasil temuannya kembali kelapangan. Dengan begitu kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuannya (Muhammad Idrus 2009:151-152).